

DAMPAK KOMPETENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN

Periansya¹, dan Sopiyan AR²
¹⁻² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: periansya@polsri.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian dilaksanakan pada 19 desa di wilayah Kecamatan Rambutan. Jumlah sampel sebanyak 76 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh nyata dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kemudian Partisipasi Masyarakat Desa juga bermanfaat dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan secara bersama-sama Kompetensi Aparatur Desa dan Patisipasi Masyarakat Desa bermanfaat dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Kompetensi, Patisipasi Masyarakat Desa, Akuntabilitas.

Abstract

The purpose of this study was to determine the Competence of Village Apparatuses and Community Participation in Village Fund Management Accountability in Rambutan, Banyuasin District. The study conducted in 19 villages in the Rambutan District.. The number of samples was 76 respondents with a purposive sampling technique—the technique of multiple linear regression data analysis. The study results show that the Competence of Village Apparatus is beneficial and essential to the Accountability of Village Fund Management. The participation of the Village Community is also beneficial and essential to the Accountability of Village Fund Management. While jointly the Competence of Village Apparatuses and the Participation of Village Communities are useful and essential to the Accountability of Village Fund Management.

Keywords: *Competences, Participations of Village Citizens, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya negara untuk memperkecil ketimpangan sosial dengan membuat aturan tentang implementasi agar pelayanan kepada masyarakat tepat sasaran dan jalannya program pemerintahan baik yang bersifat administratif ataupun keuangan sejalan dengan semangat untuk memperbaiki kesejahteraan serta kualitas penduduk desa, UU No.6 Tahun 2014 menyebutkan Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan salah satu tujuan pengaturan desa yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab”. Dalam melaksanakan programnya pemerintahan desa

memiliki tanggung jawab dan hak untuk mempercepat peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan memberdayakan semua potensi yang ada sehingga tidak bertentangan dengan dengan norma, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain memiliki hak untuk menjalankan anggaran pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip akuntabilitas demi terwujudnya prinsip *good governance* serta meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat atas adanya dana desa tersebut (Irma, 2015).

Menurut Permendes No.21 Tahun 2015 dalam pengelolaan dana desa dilandasi tata kelola dengan dasar transparan, akuntabel dan partisipatif, disamping prinsip ketaatan dalam pengelolaan anggaran (Adiwirya & Sudana,

2015). Dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan desa maka prinsip diatas menjadi perhatian dengan tanpa mengesampingkan prinsip dasar pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance* (Nuru *et al.*,2013).

Guna mendukung jalannya program desa maka dibutuhkan kompetensi sumber daya yang mampu melaksanakan tugas (Putri, *et.al*, 2019). Kompetensi merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi sehingga tersedianya sumber daya yang handal adalah sebuah keniscayaan (Sumampow *et al.*, 2017). Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Aparatur desa yang bertanggung jawab diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap kinerja (Sudirjo, 2015).

Selain kompetensi aparatur pengelolaan keuangan diperlukan peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau pelaksanaan program yang telah dianggarkan baik itu pemerintah desa, kabupaten atau pusat yang pada akhirnya masyarakat dapat melihat sejauh mana akuntabilitas kinerja yang telah dicapai dalam penggunaan dana desa tersebut. Peran serta masyarakat sangat diperlukan guna kelancaran program kerja pemerintah baik dalam pembangunan sosial kemasyarakatan ataupun infrastruktur desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya pada saran dan masukan kebijakan namun masyarakat desa ikut aktif dalam menggali potensi dan permasalahan disetiap kegiatan program sehingga terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dapat terwujud. (Syamsi, 2014 ; Novia, 2015).

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan penelitian ini adalah adanya temuan hasil evaluasi penggunaan dana desa seperti pemanfaatan dana desa di luar program prioritas, pengeluaran dana desa yang tidak dapat dibuktikan secara benar, pekerjaan infrastruktur dilakukan bukan pihak kedua /penyedia jasa, pengeluaran diluar APBDesa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017) Dalam penyelenggaraan terdapat kades

yang di laporkan ke Inspektorat Banyuasin Suprianto (2019) pasalnya oknum kepala desa tersebut melakukan penyelewengan dana desa, menurut masyarakat desa dari awal kepemimpinannya pada tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak pernah diadakan yang namanya rapat Musyawarah Desa guna pembentukan anggaran belanja desa. Hal ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat desa untuk mengelola dana desa masih kurang.

Kemudian hal lain yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti kompetensi aparatur desa karena pada tahun 2017 terdapat hambatan penyaluran dana desa pada 288 desa di Kabupaten Banyuasin termasuk Kecamatan Rambutan. Menurut pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) keterlambatan tersebut akibat terlambat melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) karena keterbatasan kompetensi aparatur yang ada. Adanya kasus tersebut maka dapat diduga bahwa kompetensi aparatur desa yang dijalankan belum maksimal.

Merujuk identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ditujukan untuk mengetahui adakah pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Desa terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

2. TELAHAH LITERATUR

Akuntabilitas

Menurut (Halim & M.Ikbal (2012) dalam (Nurlinda,2018) akuntabilitas adalah "suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban". Sedangkan (Mardiasmo, 2009) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Selain itu (Peraturan pemerintah No.71, 2010) Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan secara berkala pada pelaksanaan kebijakan

pengelolaan potensi sumber daya yang dipercayakan pada suatu organisasi.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 “pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam kewenangannya desa mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berlandaskan gagasan dan usulan dari masyarakat desa dengan tanpa mengesampingkan norma dan adat istiadat desa. Dalam pelaksanaan program kerja desa anggaran diajukan dengan tata kerja perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan kinerja keuangan desa mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Selain UU Pemerintahan desa penyelenggaraan keuangan desa adalah Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana program kerja desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang biasa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat”. Oleh karena itu pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun.

Kompetensi

Guna menjamin tercapainya akuntabilitas dan transparansi dana desa maka diperlukan sumber daya manusia yang berkompoten (Putri et al., 2019; Lotunani et al., (2014) Kompetensi merupakan kemampuan individu baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seseorang tersebut dapat mengerjakannya bertanggung jawab (Rusydi, 2017).

Partisipasi Masyarakat

Selain sumber daya manusia yang berkompoten maka untuk menunjang jalannya pemerintahan desa maka partisipasi masyarakat desa juga diperlukan Mada et al.,(2017). Partisipasi Septyasa (2013) merupakan partisipasi individu atau sekelompok orang

dalam membantu program kerja dalam suatu kegiatan. Partisipasi dan keikutsertaan tersebut baik secara fisik ataupun non fisik dengan memberikan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi. Adapun yang menjadi populasi penelitian sebanyak 19 desa. Fauzi et al.,(2019) populasi adalah sekelompok orang atau individu yang menjadi tujuan penelitian, kemudian sampel merupakan sekelompok orang atau unit yang menjadi perwakilan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang sesuai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dengan memanfaatkan kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, sehingga jumlah seluruh sampel sebanyak 76 responden.

Selanjutnya data yang diperoleh akan digunakan untuk uji kualitas data baik uji validitas maupun uji reliabilitas. Persamaan regresi linier berganda digunakan dalam penelitian dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa
- a = Intercept persamaan Regresi
- X1 = Kompetensi Aparatur Desa
- X2 = Partisipasi Masyarakat
- β = Koefisien Regresi
- e = Koefisien error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data pada penelitian ini berdasarkan kuesioner yang disebar, dimana

jumlah sampel yang diambil sebanyak 76 responden yang kesemuanya mengembalikan. Dari pertanyaan yang ditanyakan kepada responden semua dijawab. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap semua variabel yang ditanyakan baik kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh hasil valid dan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Guna menguji hipotesis atas variabel yang ditanyakan kepada responden serta untuk melihat kekuatan hubungan antara Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat sehingga perlu dilakukan pengujian Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dari hasil uji regresi berganda diketahui sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,865	1,492		1,920	,059
PMD	,112	,040	,168	2,794	,007
KAD	,541	,040	,812	13,533	,000

Sumber: *Output SPSS di olah (2019)*

Dari perhitungan tabel di atas, dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$= 2.865 + 0,168X_1 + 0,812X_2$$

Hasil persamaan ini menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 2.865 yang berarti model regresi ini memiliki nilai konstanta positif yaitu sebesar 2.865. Angka 2.865 artinya bahwa apabila nilai variabel Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat adalah 0 sehingga nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa positif sebesar 2.865. Nilai Koefisien (b₁) sebesar 0,168. Model persamaan regresi ini memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,168. Angka 0,168 artinya bahwa setiap peningkatan Kompetensi Aparatur Desa maka akan terjadi kenaikan pada Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,168 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap. Nilai koefisien (b₂) sebesar 0,812. Model persamaan regresi ini memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,812. Angka 0,812 artinya bahwa setiap peningkatan Partisipasi Masyarakat maka akan terjadi kenaikan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,812 dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat nilai kontribusi variabel independen terdiri dari Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R²)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,868 ^a	,753	,747	,897

Sumber: *Output SPSS di olah (2019)*

Dari perhitungan dengan menggunakan SPSS diatas terlihat seberapa besar hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen. Dimana nilai R Square yang ada

pada tabel 2 adalah sebesar 0,753 yang berarti adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat yang disebabkan nilainya mendekati 1. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,747 hal ini berarti 74,7% variasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel Independen, Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat Sedangkan sisanya (100% - 74,7% = 25.3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

Uji t (Parsial)

Selain uji determinasi dalam penelitian ini juga dilakukan uji t (Uji t) untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak terhadap masing-masing variabel independen: Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Hasil uji parsial (t) dengan menggunakan software SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Signifikansi Nilai t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,865	1,492		1,920	,059
PMD	,112	,040	,168	2,794	,007
KAD	,541	,040	,812	13,533	,000

Sumber: *Output SPSS di olah(2019)*

Berdasarkan output pada tabel diatas dapat di lihat nilai t_{hitung} dan derajat signifikansi masing -masing variabel independen atas X_1 dan X_2 yang merupakan indikator diterima atau ditolak hipotesis. Dari hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji t) dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 2,865 atau 2.865% yang berarti apabila nilai variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat adalah 0 maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa positif sebesar 2.865.

Uji F (Simultan)

Uji simultan (Uji F) dilaksanakan dalam rangka menguji atas pengaruh variabel bebas secara serempak (simultan) atas perubahan nilai variabel terikat. Pada pengujian ini variabel bebas atau independen adalah : Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat ditetapkan ketentuan bahwa jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis dapat diterima. Berikut hasil dan pembahasan dari perhitungan Uji F atas semua variabel bebas maupun terikat tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	179,473	2	89,736	111,451	,000 ^b
Residual	58,777	73	,805		
Total	238,250	75			

Sumber: *Output SPSS di olah (2019)*

Merujuk dari perhitungan diatas diperoleh hasil nilai F_{hitung} sebesar 111.451 dengan signifikansi senilai 0,00. Jika F_{hitung} sebesar 111.451 lebih besar dari F_{tabel} 2.73, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen : Kompetensi

Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

PEMBAHASAN

Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t hitung untuk Kompetensi Aparatur Desa adalah sebesar 13,533 dan apabila dipertemukan dengan nilai t tabel adalah 1,994. Sehingga t hitung ternyata lebih besar dari nilai t tabel yang berarti bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian sejalan dengan teori kompetensi (Robbins, 2015) dan (Bangun, 2012) yang menyatakan bahwa kompetensi diperlukan dalam menunjang kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tujuan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana. Begitu juga Sedarmayanti (2007) bahwa suatu kompetensi diperlukan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi dan pendidikan mempunyai peran penting dalam kelancaran tugas yang di amanatkan karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proposi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sumampow et al., 2017 ; Mada *et al.*, 2017) menyatakan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa artinya semakin diterapkannya Sistem Pengendalian Intern yang salah satu unsurnya lingkungan pengendalian maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t hitung untuk Partisipasi Masyarakat Desa adalah sebesar 2,794 jika dibandingkan dengan nilai t tabel adalah 1,994. Maka t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima.

Hasil penelitian ini didukung Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang desa, partisipasi masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) dan (Julianto & Dewi, 2019) menyatakan Partisipasi Masyarakat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa artinya semakin diterapkannya Partisipasi Masyarakat Desa maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil output diatas yang memiliki nilai F_{hitung} sebesar 111.451 lebih besar dari F_{tabel} 2,730 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X_1), dan Partisipasi Masyarakat (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) atau dengan kata lain hipotesis (H_3) diterima. H

Hasil perolehan nilai koefisien determinasi sebesar 74,7% yang menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X_1), dan Partisipasi Masyarakat (X_2) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 74,7% Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y), sedangkan sisanya sebesar 25,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh nyata

dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan secara simulatan Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat juga berpengaruh nyata dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.. Dengan demikian maka adanya pengaruh kompetensi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan desa di kecamatan Rambutan. Sebagai saran managerial kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu menunjang peningkatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 611–628.
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen dan AKuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & M.Ikbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah tinggi Ilmu Manajemen (YKPN).
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. *Buku Pintar Dana Desa*, 113. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Lotunani, A., Idrus, M. S., Afnan, E., & Setiawan, M. (2014). The Effect of Competence on Commitment, Performance and Satisfaction with Reward as a Moderating Variable (A Study on Designing Work plans in Kendari City Government, Southeast Sulawesi). *International Journal of Business and Management Invention*, 3(2), 18–25
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Novia. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosiatri (Pemsos)*, 4(3). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/sosioddev/article/view/674>
- Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1). https://doi.org/10.17509/jurnal_jrak.v4i1.7705
- Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Accountability*, 2(1), 1–211.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014.
- Peraturan pemerintah No.71. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Permendes No.21 Tahun 2015. tentang penerapan Dana Desa.
- Putri, H. P. A., AR, S., & Periansya. (2019). Pengaruh Kompetensi, Spi Dan Sap Terhadap Kualitas. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol.3(No.2).
- Robbins, S. P. and T. A. J. (2015). *Prilaku organisasi*. (R. Saraswati, Ed.) (16th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rusydi, M. (2017). The Role of Leadership in Supporting the Competence and Achievements of Lecturers Kopertis Region IX City of Makassar. *Review of European Studies*, 9(4), 170. <https://doi.org/10.5539/res.v9n4p170>
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Septyasa, N. L. (2013). Bentuk Bentuk Partisipasi

- masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1).
- Sudirjo, F. (2015). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, MOTIVASI, KAPABILITAS DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI(Studi Empirik Pada Inspektorat Kabupaten Pemalang). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 2302–2752. Retrieved from file:///C:/Users/USER/Downloads/162-753-1-PB.pdf
- Sumampow, M., Tinangon, J., & Tangkuman, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Kinerja Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(32), 194–201.
- Suprianto. (2019). Laporan Oknum Kades, Warga Tunggu Tindakan Inspektorat Banyuasin. *Buana Indonesia.Co.Id*. Retrieved from <https://buanaindonesia.co.id/sumsel/laporkan-oknum-kades-warga-tunggu-tindakan-inspektorat-banyuasin/>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 3(1), 42389.
- Undang Undang No.6 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Desa.